

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otoritas pemerintah di tingkat regional berperan signifikan dalam mendukung kemajuan wilayah melalui pengelolaan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu bidang penting yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD adalah bidang pendidikan, kepemudaan, serta olahraga. APBD sendiri mencakup perincian mengenai pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai program dan aktivitas pemerintah daerah. Guna mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip good governance, maka perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi aspek penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan yang efektif (Putri & Wibowo, 2021).

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan Institusi pemerintah daerah yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Kinerja pelaksanaan anggaran di Disdikpora DIY menjadi tolok ukur yang signifikan dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik guna mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama sebagai bagian dari strategi pengembangan potensi individu di daerah pembangunan karakter. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja pelaksanaan anggaran belanja daerah Disdikpora DIY selama lima tahun terakhir (2020–2024) menjadi hal yang krusial dalam mengevaluasi tingkat pencapaian dari rencana program dan aktivitas pemerintah daerah.

Dalam perencanaan anggaran, sangat diperlukan penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang terukur agar proses penganggaran lebih transparan dan berorientasi pada hasil (Simamora & Rahayu, 2021). Selain itu, akuntabilitas anggaran dapat tercapai apabila setiap alokasi dan pelaksanaan belanja diarahkan

untuk memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat (Rahmawati, 2022).

Analisis terhadap kinerja pelaksanaan anggaran memiliki relevansi yang tinggi dalam menjamin penerapan nilai-nilai tata kelola pemerintah yang baik dalam manajemen keuangan di tingkat daerah. Efektivitas pelaksanaan anggaran mengacu pada sejauh mana capaian realisasi anggaran mampu memenuhi target program dan kegiatan yang telah direncanakan. Menurut Lestari & Wibowo (2021), efektivitas anggaran diukur berdasarkan kesesuaian antara output yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai, baik dari segi waktu, biaya, maupun hasil. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, dapat diidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja organisasi.

Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, dengan penggunaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, mencerminkan pelaksanaan anggaran yang efektif. Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh anggaran yang telah dirancang dapat direalisasikan secara maksimal. Rendahnya penyerapan anggaran kerap disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan yang kurang matang, keterlambatan dalam proses administrasi, serta kendala teknis di lapangan (Siregar & Nasution, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar pelaksanaan anggaran dapat lebih efektif dan akuntabel.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk krisis akibat pandemi COVID-19 memberikan pengaruh besar terhadap jalannya roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga turut merasakan dampak dari perubahan tersebut, terutama dalam hal pengalokasian serta pelaksanaan anggaran. Dalam konteks ini, efektivitas pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting untuk dianalisis. Efektivitas anggaran mencerminkan sejauh mana penggunaan dana publik berhasil memenuhi sasaran kerja yang telah dirancang sebelumnya sesuai dengan rencana yang diterapkan (Ardiani & Susanto, 2021).

Pandemi memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran yang signifikan, sehingga evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran menjadi krusial guna memastikan setiap rupiah belanja publik dapat memberikan hasil optimal. Dengan demikian, penilaian dan telaah terhadap realisasi anggaran pengeluaran daerah di Disdikpora DIY menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana anggaran telah dikelola secara efektif dan efisien dalam menunjang pembangunan di sektor terkait (Putri & Rahmadani, 2022).

Tujuan dari studi ini adalah menyajikan pemaparan yang netral dan berdasarkan fakta mengenai pelaksanaan anggaran di lingkungan Disdikpora DIY, sekaligus menjadi dasar evaluatif yang berguna dalam penyusunan kebijakan pengalokasian dana pada periode mendatang. Disamping itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dan merumuskan strategi yang dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di sektor pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.

Menurut Sari dan Nugroho (2021), kinerja anggaran merupakan indikator sejauh mana anggaran mampu menghasilkan output sesuai yang direncanakan, serta memberikan nilai tambah terhadap capaian pembangunan. Penilaian terhadap kinerja anggaran tidak hanya terbatas pada efisiensi penggunaan dana, tetapi juga menekankan pada efektivitas dalam mencapai hasil serta manfaat program yang telah direncanakan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dengan pendekatan kinerja menjadi aspek penting dalam menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pemerintah daerah.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah, seperti rendahnya realisasi anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal. Penelitian oleh Lestari dan Rachmawati (2021) menunjukkan bahwa tingginya proporsi belanja operasional menyebabkan alokasi anggaran kurang optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kondisi tersebut

menimbulkan hambatan khusus yang harus dihadapi oleh otoritas daerah dalam upaya mengoptimalkan efisiensi serta efektivitas belanja, khususnya dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, perlu adanya reformasi dalam pengelolaan anggaran daerah untuk mendorong perbaikan kualitas belanja yang berdampak nyata terhadap pembangunan daerah.

Pelaksanaan anggaran yang efektif memiliki keterkaitan yang kuat dengan penerapan nilai-nilai akuntabilitas serta keterbukaan menjadi dasar dalam tata kelola keuangan daerah. Menurut Prabowo dan Afifah (2021), pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja harus mencerminkan prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta partisipasi publik. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja daerah menjadi penting untuk menjamin bahwa dana publik yang bersumber dari pemanfaatan optimal dari pajak serta retribusi publik bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan kinerja anggaran belanja daerah diperlukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penggunaan anggaran serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.

Anggaran memegang peranan krusial dalam mendukung program peningkatan kualitas serta pemerataan akses pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan. Anggaran daerah yang disusun secara tahunan dalam satuan moneter berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan dan pengelolaan kinerja pendidikan di daerah (Suryani et al., 2025). Strategi pengelolaan anggaran yang tepat terbukti dapat meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pada daerah-daerah dengan keterbatasan akses, lokasi terpencil, dan belum berkembang melalui pemanfaatan dana secara efisien dan sesuai kebutuhan lokal (Fardila et al., 2023). Selain itu, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara berbasis hasil juga dianggap lebih efektif dalam menjawab tantangan di lapangan (Elvira et al., 2021). Studi lain menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang efisien, terutama dalam bidang infrastruktur dan operasional sekolah, mampu mendongkrak kualitas

pendidikan dasar, meskipun beban pengeluaran seperti gaji guru masih mendominasi (Wiryatama & Khairul, 2023; Christianingrum, 2022). Oleh karena itu, anggaran pendidikan yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja sangat penting untuk mendukung jalannya operasional pendidikan secara berkelanjutan dan optimal.

Pemerintahan adalah suatu entitas publik yang memiliki kewenangan untuk mengelola serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan layanan publik. Sebagai organisasi nirlaba, tujuan utama pemerintahan adalah menyediakan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan menjadi aspek krusial agar daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat. Kapabilitas suatu daerah dalam mengelola keuangan, termasuk dalam mengoptimalkan Sumber PAD menjadi faktor utama dalam menunjang kemandirian keuangan daerah serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan (Kementerian Keuangan, 2021). Disdikpora DIY adalah instansi teknis di tingkat daerah yang bertugas mengatur dan menjalankan fungsi pengelolaan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan Disdikpora dalam mengelola anggaran tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga sebagai penanda utama keberhasilan dalam menyediakan layanan publik yang efisien dan tepat sasaran pada sektor-sektor prioritas tersebut (Disdikpora DIY, 2022). Melalui penerapan Regulasi terbaru dalam bentuk UU No. 1 Tahun 2022 mengenai hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandiriannya dalam pembiayaan kebutuhan daerah, dengan dukungan sistem desentralisasi fiskal yang lebih adil dan proporsional (Kemenkeu RI, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan keseluruhan hak dan kewajiban keuangan daerah yang dapat diukur dengan nilai uang, termasuk seluruh aset yang berhubungan, selama periode satu tahun fiskal (Putra et al., 2023). Pengeluaran oleh pemerintah daerah, yang dikenal sebagai belanja daerah, berfungsi sebagai salah satu alat dalam pelaksanaan kebijakan fiskal yang berfungsi

mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam kegiatan yang dijalankan oleh Disdikpora DIY. Semakin besar belanja daerah yang difokuskan di bidang pelayanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Studi di berbagai provinsi Indonesia menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja rutin, seperti pengeluaran untuk barang dan sektor jasa berkontribusi secara signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita (Widiastuti & Sutrischastini, 2022; Ginting, 2022). Dengan demikian, optimalisasi belanja daerah yang efisien dan tepat sasaran tidak hanya mendukung peningkatan pelayanan publik, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Penerapan kebijakan otonomi daerah dimulai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 32 Tahun 2004, serta diperkuat oleh UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Pada tahun 2004, diterapkan kebijakan terkait distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengelola keuangan secara mandiri termasuk dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah (Saleh, 2021). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, belanja daerah mencakup seluruh kewajiban keuangan pemerintah daerah yang menyebabkan penurunan aset bersih dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja tersebut meliputi belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer seperti hibah dan bantuan sosial, serta belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan, belanja barang dan jasa, hingga subsidi (Putra & Mahdi, 2023). Selain itu, menurut regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, struktur belanja daerah dibedakan menjadi belanja langsung—yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, mencakup belanja pegawai, barang/jasa, dan modal—dan belanja tidak langsung, yang tidak terkait secara langsung dengan program, seperti belanja pegawai tidak langsung, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, serta belanja tak terduga (Widyastuti & Prasetyo, 2022). Pengelompokan belanja yang lebih sistematis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas penggunaan APBD guna mendukung

pelaksanaan program pembangunan daerah secara optimal.

Belanja daerah adalah seluruh bentuk pengeluaran yang dikeluarkan melalui rekening kas umum daerah dan mengakibatkan penurunan ekuitas dana lancar dalam periode satu tahun anggaran, tanpa adanya pengembalian dana tersebut kepada pemerintah daerah, serta dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah (Pemerintah RI, 2019). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan inisiatif serta aktivitas pemerintah daerah yang dilaksanakan dengan efisiensi, efektivitas dan bertanggung jawab. Alokasi belanja dilakukan secara adil dan menyeluruh, sehingga semua golongan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara setara, terutama dalam konteks pelayanan masyarakat. Maka dari itu, belanja daerah berperan sebagai alat penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pengelolaan pemerintahan yang efektif.

Merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan, penulis bermaksud untuk mengkaji kinerja pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menerapkan judul: ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020–2024. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis laporan realisasi anggaran di sisi belanja, tanpa melibatkan aspek penerimaan maupun sumber pendanaan lainnya. Analisis ini dinilai penting karena sering ada selisih anggaran yang telah direncanakan dan pelaksanaan anggaran yang terealisasi di instansi terkait. Selain itu, analisis ini penting untuk mengevaluasi seberapa belanja digunakan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditentukan. Penulis merasa tertarik mengangkat judul tersebut karena mencakup berbagai aspek yang

mencerminkan kebutuhan dan tantangan dalam pengelolaan anggaran public terutama di Dinas Dikpora DIY ini. Penulis ingin mengetahui lebih dalam seberapa belanja Dinas Dikpora setiap tahunnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana realisasi kinerja anggaran belanja Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2020 sampai 2024?
2. Bagaimanakah kondisi Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, Efisiensi Belanja, serta proporsi Belanja terhadap RDRB pada Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun rumusan masalah tugas akhir tersebut, maka dapat diuraikan tujuan penulisan yaitu:

1. Mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Menganalisis tingkat pertumbuhan belanja Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Menilai keseimbangan alokasi belanja Disdikpora Istimewa Yogyakarta
4. Menilai Efisiensi belanja Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Menilai produktivitas dan efektifitas belanja Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Dunia Akademik

Penulisan tugas akhir ini diharapkan bisa memberikan wawasan tentang perbandingan antara teori dengan penerapannya serta menambah referensi

mengenai analisis kinerja pelaksanaan Dinas Dikpora dan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Dinas Dikpora DIY

Penulisan ini membantu mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran belanja bagi Dinas Dikpora DIY dan memahami seberapa efisiensi anggaran belanja yang digunakan. Hasil analisis juga diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan anggaran Dinas Dikpora DIY yang lebih baik di masa depan. Dan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait kinerja pelaksanaan belanja yang berhasil di capai oleh Dinas Dikpora serta digunakan sebagai alat ukur dan bahan masukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan belanja Dinas Dikpora.

3. Masyarakat

Masyarakat dapat menambah pengetahuan dengan cara mengakses informasi tentang bagaimana anggaran belanja daerah yang digunakan. Masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengelolaan anggaran belanja dengan memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran belanja dengan baik berdasarkan kriteria anggaran belanja pada dinas Dikpora.

4. Mahasiswa

Penulisan tugas akhir ini mempunyai manfaat untuk menambah wawasan yang dapat digunakan sebagai dasar/bahan pembelajaran untuk mata kuliah tentang analisis laporan keuangan. Penulisan ini juga bermanfaat untuk memahami bagaimana teori yang dapat dipelajari atau diterapkan dalam dunia nyata.